

BAB II

GAMBARAN UMUM PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2024

2.1 Profil Geografis dan Demografis DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Banten di sisi barat, Provinsi Jawa Barat di sisi timur dan selatan, serta Laut Jawa di sisi utara. Secara administratif, DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan dengan memiliki luas wilayah daratan sebesar 664,01 km² dengan total luas wilayah termasuk perairan mencapai 7.661,51 km². (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024). Posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan nasional menjadikannya kota dengan dinamika sosial-politik yang paling kompleks dan strategis di Indonesia. Setiap proses politik yang berlangsung di Jakarta selalu mendapat perhatian luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena hasilnya kerap dijadikan indikator arah politik Indonesia secara keseluruhan (Permadi, 2017).

Hal ini menempatkan Pilkada DKI Jakarta sebagai kontestasi yang memiliki bobot politik jauh melampaui batas-batas wilayah administratif. Secara demografis, DKI Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di Asia

Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk yang berdomisili secara permanen di DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai 10,68 juta jiwa. Pada siang hari, angka tersebut meningkat signifikan sebanyak 11-12 juta jiwa akibat arus masuk tenaga kerja komuter dari daerah-daerah penyangga, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Komposisi penduduk Jakarta sangat heterogen, mencakup berbagai suku bangsa, agama, kelas sosial-ekonomi, dan latar belakang budaya yang beragam. Keberagaman demografis ini memiliki implikasi langsung terhadap kompleksitas dinamika politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah yang menuntut kandidat untuk mampu merespons kebutuhan basis pemilih yang majemuk tersebut.

2.1.1 Karakteristik Sosial Politik Jakarta dalam Konteks Partisipasi Perempuan

Jakarta dikenal sebagai kota dengan tingkat kesadaran politik yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi ini ditopang oleh ketersediaan akses informasi yang lebih luas, rata-rata tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta keberadaan berbagai organisasi masyarakat sipil yang aktif mendorong keterlibatan publik dalam proses-proses politik (Permadi, 2017). Namun demikian, tingginya kesadaran politik warga Jakarta tidak selalu berbanding lurus dengan angka partisipasi pemilih dalam setiap

penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dalam dimensi relasi gender, Jakarta memperlihatkan karakter sosial-politik yang relatif lebih progresif dibandingkan mayoritas daerah lain di Indonesia. Berbagai gerakan perempuan, organisasi feminis, dan komunitas advokasi kesetaraan gender telah memiliki akar yang kuat di Jakarta. Organisasi-organisasi kemasyarakatan perempuan berbasis komunitas, seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), majelis pengajian, kelompok arisan RT/RW, dan berbagai komunitas sosial perempuan lainnya, telah lama menjadi infrastruktur sosial yang memungkinkan perempuan untuk saling terhubung, bertukar informasi, dan membangun solidaritas kolektif (Fadhillah, 2020). Jaringan-jaringan komunitas ini secara sosial telah terbukti berperan sebagai saluran transmisi informasi yang efektif, termasuk informasi politik.

Kendati demikian, budaya patriarki masih menjadi elemen yang memengaruhi posisi perempuan dalam kehidupan sosial-politik di Jakarta. Klerista dan Subandi (2025) mengidentifikasi bahwa norma-norma sosial yang bersumber dari kultur patriarki kerap menempatkan perempuan pada posisi subordinat, baik dalam ranah domestik maupun publik. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya hambatan kultural yang memengaruhi keberanian dan keleluasaan perempuan dalam mengekspresikan partisipasi politiknya. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakteristik sosial-politik Jakarta yang bersifat dualistik ini di satu sisi progresif dan di sisi lain masih terikat norma patriarki yang

menjadi prasyarat penting dalam menganalisis pola partisipasi perempuan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

2.2 Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

2.2.1 Konteks dan Dinamika Pilkada DKI Jakarta 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2024 diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pilkada DKI Jakarta 2024 memiliki keistimewaan historis tersendiri, yakni berlangsung dalam konteks transisi besar Jakarta sebagai ibu kota negara. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah menetapkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Konsekuensinya, Jakarta akan bertransformasi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara. Momentum transisi ini memberikan nuansa khusus pada Pilkada 2024 dan menjadikannya salah satu pemilihan gubernur yang paling bersejarah dalam perjalanan panjang kota Jakarta.

Kekhasan Pilkada DKI Jakarta 2024 juga terletak pada ketentuan ambang batas kemenangan yang diberlakukan. Berbeda dengan pilkada di provinsi-provinsi lain yang menerapkan sistem *plurality* atau suara

terbanyak, Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan pada tahun 2024 telah bertransformasi menjadi Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan menggunakan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang mensyaratkan pasangan calon harus memperoleh suara lebih dari 50 persen untuk memenangkan pemilihan dalam satu putaran. Apabila tidak ada pasangan calon yang memenuhi ambang batas tersebut, pemilihan akan dilanjutkan ke putaran kedua. Ketentuan ini menciptakan tekanan elektoral tersendiri bagi seluruh peserta, dan secara langsung mendorong tim pemenangan masing-masing pasangan calon untuk mengoptimalkan mobilisasi dukungan secara lebih intensif.

Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni: (1) Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh koalisi partai besar KIM Plus; (2) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang maju melalui jalur independen; serta (3) Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura. Ketiga pasangan ini mewakili tiga spektrum kekuatan politik yang berbeda, sehingga kontestasi berlangsung secara kompetitif dan multidimensional. Ketentuan ambang batas kemenangan lebih dari 50 persen yang diberlakukan khusus bagi Pilkada DKJ mendorong masing-masing tim pemenangan untuk mengoptimalkan setiap segmen

pemilih secara lebih intensif, termasuk segmen pemilih perempuan yang mendominasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

2.2.2 Rekapitulasi Data Pemilih dan Hasil Pilkada DKI Jakarta 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara Pilkada mencatat bahwa total Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 berjumlah 8.214.007 orang, terdiri atas 4.048.811 pemilih laki-laki dan 4.165.196 pemilih perempuan (KPU DKI Jakarta, 2024). Data ini memperlihatkan bahwa secara kuantitas, pemilih perempuan melampaui pemilih laki-laki dengan selisih sebesar 116.385 orang. Fakta ini menegaskan posisi strategis pemilih perempuan sebagai kelompok demografis yang paling determinan dalam menentukan hasil akhir Pilkada DKI Jakarta 2024.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 per Wilayah Administratif

No.	Wilayah Administratif	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Total DPT
1.	Kota Jakarta Timur	1.172.416	1.202.412	2.374.828
2.	Kota Jakarta Barat	944.022	965.752	1.909.774
3.	Kota Jakarta Selatan	859.783	889.178	1.748.961

No.	Wilayah Administratif	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Total DPT
4.	Kota Jakarta Utara	665.812	679.003	1.345.815
5.	Kota Jakarta Pusat	399.461	414.260	813.721
6.	Kab. Adm. Kep. Seribu	10.317	10.591	20.908
	Total	4.048.811	4.165.196	8.214.007

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta, 2024 (data diolah peneliti)

Tabel 2.1 memperlihatkan distribusi pemilih yang tidak merata antarwilayah, dengan Jakarta Timur sebagai wilayah dengan jumlah DPT terbesar, yaitu 2.374.828 pemilih, diikuti oleh Jakarta Barat (1.909.774 pemilih), dan Jakarta Selatan (1.748.961 pemilih). Sementara itu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencatat jumlah DPT terendah, yakni hanya 20.908 pemilih. Distribusi pemilih yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta Timur, Barat, dan Selatan ini menjadi pertimbangan strategis bagi tim pemenangan dalam menentukan prioritas wilayah kampanye, termasuk dalam hal mobilisasi jaringan perempuan. Pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, sebanyak 4.724.393 pemilih menggunakan hak pilihnya dari total DPT 8.214.007 orang, sehingga tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 57,52 persen.

Dari total tersebut, suara sah berjumlah 4.360.629 dan suara tidak sah sebanyak 363.764. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berhasil meraih kemenangan satu putaran dengan perolehan

2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah melampaui ambang batas 50 persen yang dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKI (KPU DKI Jakarta, 2024). Kemenangan tersebut diraih dengan selisih yang tidak terlampau besar dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang memperoleh 1.718.160 suara (39,40%), serta pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang meraih 459.230 suara (10,53%). Kemenangan tipis Pramono Anung-Rano Karno di ambang batas 50 persen ini menegaskan bahwa setiap kelompok pemilih, termasuk pemilih perempuan yang mendominasi DPT, memainkan peran yang sangat menentukan dalam hasil akhir kontestasi.

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada DKI Jakarta 2024

Pasangan Calon	No. Urut	Perolehan Suara	Persentase (%)	Keterangan
Ridwan Kamil – Suswono	1	1.718.160	39,40	Kalah
Dharma Pongrekun – Kun Wardana	2	459.230	10,53	Kalah
Pramono Anung Wibowo – Rano Karno	3	2.183.239	50,07	Menang
Total Suara Sah		4.360.629	100,00	
Suara Tidak Sah		363.764		
Total Pengguna Hak Pilih		4.724.393		

Pasangan Calon	No. Urut	Perolehan Suara	Persentase (%)	Keterangan
Daftar Pemilih Tetap (DPT)		8.214.007		
Tingkat Partisipasi Pemilih		—	57,52	

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, 2024 (data diolah peneliti).

2.3 Profil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024

2.3.1 Profil Pramono Anung Wibowo

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. merupakan politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 11 Juni 1963. Ia menempuh pendidikan tinggi di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB), Program Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Doktor Ilmu Komunikasi Politik di Universitas Padjajaran. Ia membangun karier secara konsisten di jalur politik dan pemerintahan. Rekam jejak politiknya dimulai dari lembaga legislatif, di mana ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Jawa Timur selama beberapa periode, sekaligus menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.

Puncak karier birokrasinya diraih ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Pramono Anung untuk menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia periode 2015-2024, yang dijalannya sejak Kabinet Kerja hingga Kabinet Indonesia Maju. Posisi tersebut menempatkannya pada jantung mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintahan tertinggi, sekaligus memperluas jaringan politiknya di seluruh elemen kekuasaan negara. Modal pengalaman di ranah legislatif dan eksekutif pusat, dikombinasikan dengan jaringan politik yang luas, menjadi keunggulan utama yang ditawarkan Pramono Anung dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024.

2.3.2 Profil Rano Karno

H. Rano Karno, S.I.P. lahir di Jakarta, 08 Oktober 1960, dan merupakan figur publik yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya melalui jalur politik, tetapi juga melalui karier seni dan perfilman yang telah dirintisnya sejak era 1970-an. Ketenaran Rano Karno sebagai aktor khususnya melalui perannya yang ikonik dalam sinetron “Si Doel Anak Sekolahan” memberikan modal elektoral yang signifikan, karena ia dikenal secara lintas generasi dan lintas kelas sosial-ekonomi. Popularitas yang bersumber dari dunia seni tersebut terbukti efektif dalam menjangkau segmen pemilih yang sulit dijangkau oleh figur-figur politik konvensional. Karier politiknya dimulai dari jalur pemerintahan daerah, yakni sebagai Wakil Bupati Tangerang (2008–2011) dan Wakil Gubernur Banten (2012–2014).

Karier tersebut berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi ketika ia menjabat secara definitif sebagai Gubernur Banten (2015-2017). Kombinasi antara popularitas sebagai tokoh publik yang dicintai masyarakat dan pengalaman konkret dalam tata kelola pemerintahan daerah menjadikan Rano Karno sebagai pasangan yang tepat untuk melengkapi rekam jejak Pramono Anung di tataran pemerintahan pusat. Dalam strategi kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024, figur Rano Karno memainkan peran kunci sebagai magnet elektoral terutama dalam menarik perhatian pemilih perempuan dari kalangan ibu rumah tangga dan generasi yang akrab dengan karya-karya seninya.

2.3.3 Visi, Misi, dan Platform Kampanye Pasangan Pramono Anung – Rano Karno

Slogan kampanye “Jakarta Menyala” yang digunakan oleh pasangan Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam pilkada DKI Jakarta 2024 memiliki makna simbolis yang kuat. Kata menyala menggambarkan semangat, harapan dan optimisme untuk membawa Jakarta ke arah yang lebih maju dan terang. Mengusung visi "Menuju Provinsi DKI sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan" sebagai payung besar arah pembangunan yang akan mereka wujudkan apabila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dari visi tersebut, diturunkan empat dimensi misi utama yang menjadi landasan program kampanye, yaitu: (1) Dimensi Manusia, yakni membangun masyarakat modern megapolitan yang madani, berbudaya, dan sejahtera, mencakup pemerataan akses pendidikan berkualitas dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi serta peningkatan layanan kesehatan yang mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat; (2) Dimensi Ekonomi, yakni mewujudkan pusat ekonomi yang inovatif dan kompetitif melalui perluasan akses pada sumber kehidupan dan pemerataan distribusi manfaat pembangunan, termasuk penguatan UMKM dan ekonomi kreatif; (3) Dimensi Pemerintahan, yakni mewujudkan tata kelola kota yang akuntabel dan responsif dalam pemberian layanan publik yang prima; serta (4) Dimensi Pembangunan Lingkungan, yakni mewujudkan ruang aktivitas kehidupan berkualitas yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, 2024).

Untuk merealisasikan visi-misinya, Pramono Anung-Rano Karno merancang 10 kategori program kerja yang akan dijelankannya jika menang di pemilihan gubernur Jakarta nanti. Berikut merupakan 10 program kerja Pramono Anung-Rano Karno, yakni: (1) Jakarta Belajar, (2) Jakarta bugar dan produktif, (3) Jakarta Bekerja, (4) Jakarta Bergerak, (5) Jakarta Berkeadilan, (6) Jakarta Berdedikasi, (7) Jakarta Bermukim, (8) Jakarta Berseri, (9) Jakarta Berolahraga dan Berbudaya, dan (10) Jakarta Berwisata (Dedi, 2024).

Meskipun perempuan tidak dirumuskan sebagai pilar misi tersendiri, isu-isu yang relevan dengan kehidupan perempuan secara substantif tersebar dalam beberapa program prioritas pasangan ini. Pada program Jakarta Berkeadilan, mencakup kepastian hunian layak bagi warga miskin, akses pelatihan UMKM, dan modal kerja bagi masyarakat kurang mampu yang secara proporsional berdampak pada perempuan kepala keluarga dan pelaku usaha mikro. Selain itu, program Jakarta Bugar dan Produktif menekankan perluasan layanan kesehatan yang mudah diakses, perluasan akses layanan kesehatan reproduksi, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender termasuk oleh kelompok rentan. Penanganan banjir, kemacetan, dan ketersediaan transportasi publik yang terintegrasi juga menjadi perhatian, mengingat persoalan-persoalan tersebut secara langsung berpengaruh pada mobilitas, keamanan, dan kesejahteraan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta. Penempatan isu keadilan sosial dan inklusivitas dalam narasi kampanye ini menjadi bagian dari strategi elektoral yang disadari, mengingat pemilih perempuan secara kuantitatif mendominasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta 2024 (KPU DKI Jakarta, 2024).

2.3.4 Pasangan Pramono Anung–Rano Karno dalam Proses Pemenangan Pilkada DKI Jakarta 2024

Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi salah satu fenomena politik yang menarik untuk dikaji, sebab keduanya memenangkan kontestasi meskipun hanya didukung oleh dua koalisi partai. Pasangan nomor urut 3 ini memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah dan berhasil memenangkan kontestasi dalam satu putaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pemenangan Pramono–Rano tidak dapat dipahami hanya melalui keberadaan struktur partai politik, tetapi perlu dilihat sebagai hasil interaksi antara figur kandidat, program politik, strategi komunikasi, jaringan relawan, komunitas, serta mobilisasi masyarakat. Salah satu karakteristik penting pasangan Pramono Anung–Rano Karno adalah adanya perpaduan dua bentuk modal politik yang berbeda. Pramono Anung membawa pengalaman panjang dalam politik nasional dan pemerintahan. Pengalamannya sebagai anggota DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, hingga Sekretaris Kabinet memberikan modal institusional berupa pemahaman mengenai birokrasi, proses pengambilan keputusan, koordinasi antarlembaga, serta dinamika hubungan antara pemerintah dan aktor politik. Sementara itu, Rano Karno memiliki pengalaman pemerintahan daerah sebagai Wakil Bupati Tangerang, Wakil Gubernur Banten, dan Gubernur Banten. Dengan demikian, Rano juga memiliki pengalaman eksekutif yang relevan dalam memahami persoalan

pemerintahan daerah. Perbedaannya, pengalaman tersebut berjalan berdampingan dengan modal sosial dan budaya yang telah dibangun Rano melalui karier panjangnya di dunia hiburan.

Kombinasi tersebut menghasilkan pasangan yang memiliki sumber daya politik yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi, Pramono dengan pengalaman institusional dan strategis, sedangkan Rano dengan pengalaman pemerintahan daerah sekaligus pengenalan publik yang kuat. Perpaduan pengalaman tersebut menjadi semakin penting karena kontestasi Pilkada Jakarta tidak hanya membutuhkan kemampuan merumuskan kebijakan, tetapi juga kemampuan menjelaskan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Dalam konteks tersebut, Pramono dapat ditempatkan sebagai figur yang membawa pengalaman politik dan pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan Rano mempunyai kapasitas komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pengalaman panjangnya sebagai figur publik. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa keduanya memiliki pembagian tugas yang sepenuhnya terpisah, tetapi menunjukkan adanya komplementaritas sumber daya politik. Pengalaman Pramono memberikan dasar institusional bagi narasi mengenai tata kelola pemerintahan, sedangkan pengalaman Rano dalam dunia hiburan dan pemerintahan daerah memberikan modal untuk membangun

komunikasi yang lebih personal dan mudah diterima oleh masyarakat.

2.3.4.1 Program sebagai Substansi Pemenangan dan Instrumen

Komunikasi Politik

Perpaduan antara pengalaman dan popularitas tersebut kemudian diterjemahkan melalui program kampanye. Pasangan Pramono–Rano menggunakan narasi “Jakarta Menyala, Kagak Ribet Dah” sebagai identitas kampanye yang menghubungkan agenda pembangunan Jakarta dengan bahasa yang lebih dekat dengan masyarakat. Visi yang ditawarkan tidak hanya menekankan pembangunan fisik, tetapi mencakup Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang berdaya saing, sekaligus menekankan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam berbagai agenda seperti Jakarta Belajar, Jakarta Bugar dan Produktif, Jakarta Bekerja, Jakarta Bergerak, Jakarta Berkeadilan, Jakarta Berdedikasi, Jakarta Bermukim, Jakarta Berseri, Jakarta Berolahraga dan Berbudaya, serta Jakarta Berwisata. Dengan demikian, slogan “Jakarta Menyala” tidak berdiri sendiri sebagai jargon kampanye, tetapi menjadi payung komunikasi yang

menghubungkan berbagai agenda kebijakan dengan gambaran mengenai Jakarta yang ingin dibangun.

Keunikan strategi kampanye Pramono–Rano terlihat lebih jelas melalui penggunaan nama-nama karakter dalam serial “*Si Doel*” sebagai identitas sejumlah program. Rano Karno memperkenalkan “Mas Karyo” sebagai Masyarakat Jakarta Yakin Online, kenaikan anggaran RT/RW yang diarahkan pada penyediaan Wi-Fi di setiap RT dan dikaitkan dengan pengembangan CCTV lingkungan. “ATUN” merupakan Akselerasi Tunjangan untuk ASN, sedangkan “Mak Nyak” merupakan Makan Enak, Tidur Enak, yang antara lain dikaitkan dengan program makan gratis bagi pekerja jalanan. Program lain kemudian menggunakan nama Jaenab, Mandra, Sabeni, Sarah, Pak Tile, Mpo Sarah, Karyo, OPLET, dan SIDOEL. Rano menjelaskan bahwa penggunaan nama tersebut bukan semata-mata *gimmick*, melainkan merupakan upaya mencocokkan substansi program dengan nama karakter “Si Doel” yang telah dikenal masyarakat. Secara lebih rinci, “SABENI” merupakan Sekolah Bebas Pungutan, Orang Tua Tak Terbebani dan diarahkan pada persoalan biaya pendidikan. “Mandra” merupakan Modernisasi Aksesibilitas dan Transportasi Ramah Anak Muda, “OPLET” merupakan Optimalisasi

Peluang Ekonomi Lokal Tanpa Lelet, “SARAH” merupakan Sistem Aksesibilitas yang Ramah, “Jaenab” merupakan Jaringan Edukasi Nasional untuk Anak Bangsa, dan “SIDOEL” merupakan Sistem Dokar Elektronik. Sementara itu, Pak Tile berkaitan dengan pemasangan kamera untuk ketertiban dan keamanan lingkungan, Mpo Sarah dengan pembangunan pusat olahraga, seni, dan aktivitas rakyat dengan biaya terjangkau. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pasangan Pramono–Rano berusaha menghubungkan isu kebijakan yang relatif teknokratis dengan istilah yang familiar secara kultural.

Strategi tersebut memiliki arti penting dalam komunikasi politik karena membuat program yang pada dasarnya bersifat administratif dan teknokratis menjadi lebih mudah dikenali. Hal tersebut terlihat dalam survei Poltracking terhadap 2.000 responden pada Oktober 2024. SABENI menjadi program Pramono–Rano yang paling banyak disukai responden dengan 12,4 persen, diikuti program CCTV di setiap RT/RW sebesar 10 persen dan Transjakarta Jabodetabek sebesar 5,9 persen. Program Pak Tile memperoleh 4,5 persen, OPLET dan SARAH masing-masing 4,1 persen, Jaenab 3,9 persen, Mak Nyak 3,7 persen, sedangkan Mandra dan ATUN masing-masing 3,3 persen.

Data tersebut tidak membuktikan bahwa program-program tersebut secara langsung menyebabkan kemenangan, tetapi menunjukkan bahwa sebagian program yang menggunakan identitas tersebut memperoleh perhatian dan pengenalan publik selama masa kampanye.

2.3.4.2 Magnet “Si Doel” dan Modal Budaya Rano Karno

Penggunaan nama-nama karakter “Si Doel” menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan posisi Rano Karno sebagai figur yang telah lama dikenal masyarakat. Dalam konteks ini, popularitas Rano bukan sekadar popularitas selebritas, tetapi dapat dipahami sebagai modal budaya dan modal komunikasi yang telah terbentuk sebelum Pilkada 2024. Identitas Rano sebagai “Si Doel” telah melekat dalam ingatan masyarakat melalui serial televisi dan kemudian diperkuat melalui film *Si Doel the Movie*. Penggunaan nama “Si Doel” dalam kampanye memungkinkan Rano membawa identitas yang telah dikenal masyarakat ke dalam ruang politik formal. Bahkan, penggunaan nama tersebut secara resmi menjadi bagian dari identitas kampanye setelah nama Rano Karno dikaitkan dengan sebutan “Si Doel”. Dalam perspektif komunikasi politik, kondisi tersebut memberikan keuntungan berupa *name recognition* dan kedekatan simbolik. Masyarakat yang sebelumnya mengenal Rano

melalui karakter Doel tidak harus membangun pengenalan terhadap figur tersebut dari awal ketika berhadapan dengan Rano sebagai kandidat politik.

Karakter Doel juga memiliki asosiasi kuat dengan Jakarta dan budaya Betawi, sehingga identitas tersebut dapat menjadi jembatan antara pengalaman masyarakat dengan media hiburan dan pesan politik dalam Pilkada. Namun demikian, popularitas tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai penyebab kemenangan. Popularitas lebih tepat dipahami sebagai salah satu sumber daya yang digunakan dalam komunikasi politik, yang efektivitasnya bergantung pada kemampuan pasangan calon menghubungkannya dengan program, jaringan, dan aktivitas kampanye. Daya tarik tersebut juga memiliki potensi menjangkau pemilih lintas generasi. Bagi generasi yang telah menyaksikan “Si Doel” sejak era televisi, Rano dapat hadir melalui memori terhadap karakter yang telah familiar. Sementara bagi generasi yang lebih muda, identitas tersebut kembali diperkenalkan melalui film, media sosial, dan kampanye politik. Dengan demikian, “Si Doel” berfungsi sebagai simbol yang memungkinkan Rano menghubungkan pengalaman masa lalu dengan konteks politik kontemporer. Hal ini menjadi relevan dalam memahami mengapa kegiatan

kampanye Pramono–Rano dapat menggunakan unsur hiburan, budaya, dan interaksi informal tanpa sepenuhnya kehilangan substansi politik.

2.3.4.3 Kepemimpinan dan Kedekatan dengan Masyarakat

Kedekatan dengan masyarakat dibangun melalui pola komunikasi langsung. Dalam kampanye, Rano melakukan kegiatan blusukan dan berdialog dengan masyarakat serta ketua RT/RW untuk memperoleh informasi mengenai persoalan yang dihadapi warga. Ketika memperkenalkan program berbasis nama “Si Doel”, Rano tidak hanya menjelaskan program, tetapi juga meminta masukan mengenai persoalan masyarakat di tingkat akar rumput, seperti sampah, banjir, dan pendidikan. Pendekatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam gagasan Jaring Asmara, yaitu mekanisme untuk menghimpun aspirasi masyarakat sampai tingkat RT/RW sehingga program yang dirumuskan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan dengan rakyat tidak hanya dibangun melalui simbol budaya, tetapi juga melalui mekanisme komunikasi dua arah.

Masyarakat diposisikan bukan hanya sebagai penerima pesan kampanye, tetapi juga sebagai sumber

informasi mengenai persoalan yang hendak diselesaikan. Hal ini penting bagi penelitian karena pola komunikasi semacam itu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk masuk ke dalam jaringan politik kandidat. Dalam konteks partisipasi perempuan, jaringan sosial seperti RT/RW, PKK, komunitas, kelompok ibu-ibu, dan relawan dapat menjadi saluran yang menghubungkan isu kandidat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Sementara itu, Pramono menunjukkan bentuk kedekatan yang lebih berorientasi pada persoalan tata kelola dan penyelesaian masalah. Ia beberapa kali menekankan bahwa pembangunan Jakarta tidak harus selalu diwujudkan melalui proyek besar, tetapi dapat dimulai dari penyelesaian persoalan konkret masyarakat. Dengan demikian, terdapat perbedaan nuansa antara keduanya. Rano lebih mudah membangun kedekatan emosional dan kultural, sedangkan Pramono lebih kuat dalam membangun narasi pengalaman pemerintahan dan penyelesaian persoalan secara institusional. Keduanya kemudian membentuk citra pasangan yang berusaha menggabungkan pendekatan teknokratis dengan pendekatan populis.

2.3.4.4 Keahlian Strategis dan Koneksi Sosial

Perpaduan antara Pramono-Rano ini dibaca sebagai hubungan antara keahlian strategis dan koneksi sosial.

Pengalaman Pramono dalam pemerintahan pusat memberikan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan harus dikonsolidasikan melalui birokrasi dan institusi. Sebaliknya, Rano memiliki kemampuan menjangkau masyarakat melalui jaringan sosial dan budaya yang telah dibangun jauh sebelum pencalonannya. Dalam kampanye, kedua sumber daya tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Program yang membutuhkan kapasitas administratif disampaikan bersama narasi yang lebih populer, sementara simbol budaya yang melekat pada Rano ditempatkan berdampingan dengan program-program pemerintahan yang konkret. Hal tersebut menjadi penting karena Jakarta merupakan wilayah dengan persoalan yang kompleks. Persoalan transportasi, banjir, pendidikan, kesehatan, hunian, lapangan kerja, keamanan lingkungan, dan kesenjangan sosial tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan komunikasi populis. Sebaliknya, kebijakan yang secara teknokratis baik juga membutuhkan kemampuan komunikasi dan penerimaan sosial. Oleh karena itu, pasangan Pramono–Rano dapat dipahami sebagai pasangan yang berusaha menggabungkan dua kebutuhan tersebut: kapasitas pemerintahan untuk merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan serta kemampuan komunikasi untuk memperoleh penerimaan masyarakat.

2.3.4.5 Gaya Komunikasi dan Personalitas

Perbedaan latar belakang juga tercermin dalam gaya komunikasi keduanya. Pramono cenderung memiliki gaya komunikasi yang lebih tenang, terukur, dan institusional sebagai konsekuensi dari pengalaman panjangnya dalam politik dan pemerintahan. Gaya tersebut mendukung citra sebagai figur yang memiliki pengalaman dalam bernegosiasi dan bekerja dalam struktur pemerintahan. Rano, sebaliknya, memiliki gaya komunikasi yang lebih cair, populer, dan kultural. Pengalaman sebagai aktor membuatnya terbiasa berkomunikasi melalui ekspresi, humor, cerita, serta bahasa yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk komplementaritas komunikasi, bukan pertentangan antara gaya diplomatis dan populis. Pramono memberikan kesan kompetensi dan stabilitas, sedangkan Rano memberikan kesan kedekatan dan familiaritas. Dalam kampanye, kombinasi tersebut memungkinkan pasangan calon berbicara kepada kelompok yang berbeda melalui pendekatan yang berbeda pula. Hal tersebut menjadi semakin terlihat dalam kegiatan kampanye

yang menggabungkan pidato politik, pertunjukan hiburan, interaksi dengan relawan, dan penggunaan simbol budaya.

2.3.4.6 Penyelesaian Masalah Jakarta

Dari sisi substansi, pasangan Pramono–Rano berusaha menghubungkan citra kandidat dengan masalah konkret Jakarta. Program-program seperti SABENI berangkat dari persoalan pendidikan dan beban orang tua, Mas Karyo dan Pak Tile berhubungan dengan konektivitas dan keamanan lingkungan, Mandra berkaitan dengan transportasi, OPLET dengan ekonomi lokal; sementara Jaring Asmara dirancang sebagai saluran penghimpunan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, program kampanye tidak sepenuhnya dibangun berdasarkan simbol personal Rano, tetapi berusaha mengaitkan simbol tersebut dengan kebutuhan kebijakan. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan adanya upaya *problem solving* berbasis aspirasi lokal. Rano menyatakan bahwa persoalan setiap wilayah dapat berbeda sehingga aspirasi dari RT/RW perlu dihimpun sebagai bahan penyusunan program. Pendekatan ini relevan dengan karakter Jakarta sebagai kota yang memiliki persoalan berbeda antarwilayah. Bagi penelitian mengenai partisipasi perempuan, mekanisme semacam ini penting karena membuka ruang interaksi antara kebijakan

kandidat dengan jaringan masyarakat yang dalam penelitianmu menjadi salah satu ruang partisipasi perempuan.

2.3.4.7 Ketokohan di Tengah Keterbatasan Dukungan Partai

Pemenangan Pramono–Rano perlu dilihat dalam konteks sumber daya kepartaian. Pasangan ini tidak memiliki koalisi partai sebesar lawannya. Karena itu, sumber daya pemenangan harus diperluas melalui tokoh, relawan, komunitas, dan jaringan sosial. Dalam konteks ini, ketokohan Pramono dan Rano berfungsi sebagai salah satu sumber daya yang membantu memperluas jangkauan kampanye. Pramono memiliki modal pengalaman politik dan pemerintahan, sementara Rano memiliki modal popularitas dan kedekatan kultural. Relawan menunjukkan bahwa ketokohan harus diterjemahkan menjadi jaringan dan kerja politik. Relawan Teman Pramono, misalnya, menyatakan melakukan penggarapan komunitas dan bergerak melalui jaringan struktur partai serta komunitas. Dengan demikian, hubungan antara ketokohan dan kemenangan lebih tepat dipahami sebagai sebuah rantai proses yaitu pengenalan figur → komunikasi politik → pembentukan dukungan → pengorganisasian melalui jaringan → mobilisasi pemilih.

2.3.4.8 Strategi Kampanye dan Mobilisasi Relawan

Strategi kampanye Pramono–Rano memperlihatkan perpaduan antara narasi personal, isu kebijakan, budaya populer, dan jaringan komunitas. “Jakarta Menyala” menjadi payung narasi, sedangkan “Si Doel” menjadi salah satu simbol kultural yang membuat kampanye lebih mudah dikenali. Program-program seperti SABENI, Mandra, Karyo, Mas Karyo, dan lainnya kemudian memberikan substansi konkret terhadap narasi tersebut. Dengan demikian, kampanye tidak hanya menjual figur, tetapi berusaha menghubungkan figur dengan program. Mobilisasi kemudian dilakukan melalui kegiatan yang bersifat formal maupun informal. Kampanye akbar “Festival Menyala” misalnya dikemas dengan pendekatan yang menekankan kegembiraan dan partisipasi publik. Pramono menyebut pendekatan tersebut sebagai upaya membuat masyarakat Jakarta “riang gembira”, yang sekaligus memperlihatkan penggunaan karakter budaya Jakarta dalam suasana kampanye. Pada kegiatan lain di GBK, pasangan tersebut berinteraksi dengan relawan dan kelompok ibu-ibu Srikandi Relawan Pramono–Rano Karno atau R3PRO.

Keberadaan kelompok perempuan dalam kegiatan tersebut menjadi relevan dengan penelitian ini. Perempuan

bukan hanya hadir sebagai penerima pesan kampanye, tetapi dapat menjadi bagian dari jaringan yang menyebarkan informasi, membangun dukungan, dan melakukan mobilisasi. Dengan demikian, popularitas kandidat dan strategi komunikasi kampanye menciptakan lingkungan politik, sementara jaringan relawan menyediakan saluran yang memungkinkan perempuan mengubah ketertarikan atau dukungan menjadi tindakan politik.

Secara keseluruhan, kepemimpinan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta merupakan contoh menarik tentang bagaimana kombinasi modal politik yang berbeda antara pengalaman birokrasi-teknokratis di satu sisi dan popularitas budaya-personal di sisi lain dapat saling memperkuat untuk menghasilkan kemenangan elektoral yang signifikan, bahkan di tengah keterbatasan dukungan struktural kepartaian. Fenomena ini membuka ruang diskusi akademik yang luas mengenai personalisasi politik, peran modal budaya dalam elektabilitas, efektivitas komunikasi politik yang menggabungkan pendekatan diplomatis dan populis, serta pergeseran pola mobilisasi kampanye dari basis partai menuju basis relawan dan komunitas.

2.4 Tim Pemenangan Pramono Anung – Rano Karno

2.4.1 Organisasi Tim Pemenangan

Tim pemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dibentuk melalui struktur formal yang menggabungkan unsur partai

politik pengusung, tokoh masyarakat, profesional, seniman, anggota legislatif, serta jaringan relawan. Dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, pasangan Pramono–Rano secara resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Meskipun hanya didukung oleh dua partai politik, tim pemenangan pasangan tersebut berupaya memperluas basis dukungannya dengan melibatkan figur dan kelompok yang berasal dari latar belakang politik maupun sosial yang beragam (Putri, 2024). Struktur utama tim pemenangan menempatkan Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Dewan Pengarah, Lies Hartono atau Cak Lontong sebagai Ketua Tim Pemenangan, dan Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Harian. Sejumlah tokoh lain ditempatkan sebagai wakil ketua, antara lain Once Mekel, Putra Nababan, Maudy Koesnaedi, dan Darmadi Duriyanto.

Struktur tersebut juga dilengkapi dengan posisi sekretaris, bendahara, juru bicara, serta sejumlah bidang yang menangani kampanye dan sosialisasi, penggalangan, program, data dan analisis, hukum dan advokasi, media, serta pemilih muda atau Generasi Z (Luxiana, 2024; Katadata, 2024). Penempatan bidang khusus pemuda menunjukkan bahwa tim pemenangan menggunakan pendekatan segmentasi pemilih berdasarkan karakteristik demografis. Keterlibatan perempuan juga terlihat dalam struktur kepemimpinan tim. Maudy Koesnaedi, misalnya, ditempatkan sebagai salah satu wakil ketua. Selain itu, struktur tim memuat sejumlah perempuan dalam bidang

kerja dan jaringan pendukung. Tim pemenangan juga bersifat terbuka terhadap bergabungnya aktor dari luar partai pengusung. Beberapa orang yang sebelumnya terlibat dalam Tim Nasional Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pemilu Presiden 2024, seperti Aldy Perdana Putra dan Mandira Bienna Elmira, bergabung dengan tim Pramono Anung–Rano Karno.

Pramono Anung menyatakan bahwa timnya menerima siapa pun yang bersedia membantu dan memiliki kesesuaian dengan program yang ditawarkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tim pemenangan tidak semata-mata dibangun berdasarkan loyalitas partai, tetapi juga melalui proses perluasan koalisi sosial dan perekrutan aktor yang mempunyai pengalaman kampanye, komunikasi politik, serta pengolahan data (Luxiana, 2024). Di luar struktur formal tersebut, tim pemenangan mengembangkan hubungan dengan berbagai kelompok relawan. Salah satunya adalah Relawan Teman Pramono yang bergerak secara swadaya dan memfokuskan kegiatannya pada penggarapan komunitas, sosialisasi program, penyebaran materi kampanye, kegiatan menonton bersama debat, serta pendataan calon pemilih berdasarkan nama dan alamat. Relawan ini secara khusus memusatkan kegiatan di wilayah Jakarta Pusat dan melibatkan kelompok anak muda, aktivis, pengacara, serta pengusaha (Junida, 2024).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja pemenangan dilaksanakan melalui pembagian jalur antara struktur partai, anggota

legislatif, tim formal, dan kelompok relawan berbasis komunitas. Jaringan relawan juga berperan dalam pengawalan suara. Menjelang pemungutan suara, kelompok Warga Kawal TPS menggelar konsolidasi yang direncanakan melibatkan sekitar 15.000 pendukung. Kelompok tersebut mempersiapkan petugas untuk ditempatkan di berbagai tempat pemungutan suara di Jakarta dengan tujuan mengawal proses penghitungan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Selain aktor yang berada dalam struktur kemenangan, dukungan dari tokoh laki-laki juga menjadi bagian dari dinamika politik pasangan Pramono–Rano. Dukungan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama, Anak Abah yang memiliki jaringan luas di basis pemilih Islam dan komunitas masyarakat urban, aktif dalam pendekatan berbasis dakwah dan sosial kemasyarakatan. Mereka mengadakan diskusi, kajian, dan pertemuan informal untuk menjelaskan visi, misi dan program paslon Pramono–Rano. Mereka aktif mensosialisasikan figur Pramono–Rano sebagai pemimpin yang merakyat dan bersahaja serta memiliki pengalaman dan kapasitas untuk menjadikan kehidupan warga Jakarta lebih baik. Ahokers, dengan pengaruh kuat di kalangan profesional, komunitas bisnis, dan warga perkotaan, berkontribusi dalam menerapkan strategi digital, kampanye berbasis data, serta gerakan sukarelawan yang bergerak dimedia sosial dan komunitas lokal.

Kolaborasi ini turut memberikan konteks terhadap perluasan basis dukungan pasangan calon. Diyakini juga banyak relawan yang

berperan memenangkan pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, antara lain:

A. Komunitas Relawan Berbasis Masyarakat Umum

1. Relawan Pramono-Rano Bersatu (PRB)
2. Sahabat Rano Karno (SRK)
3. Jakarta Bergerak untuk Pramono-Rano
4. Relawan Betawi Cinta Pramono (RBCP)
5. Solidaritas Masyarakat Jakarta (SMJ)

B. Komunitas Budaya dan Masyarakat Betawi

1. Forum Betawi Rempug (FBR)
2. Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi)
3. Laskar Betawi Bersatu (LBB)
4. Paguyuban Jawara dan Pengacara (Bang Japar)
5. Komunitas Budaya Betawi Pesisir
6. Komunitas Oplet

C. Komunitas Profesi dan Pekerja

1. Aliansi Sopir Angkot Jakarta (ASAJ)
2. Paguyuban Ojek Online Pramono-Rano
3. Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) DKI
4. Serikat Buruh Mandiri Jakarta

D. Komunitas Relawan Berbasis Milenial dan Pemuda

1. Jakarta Muda Bergerak (JMB)
2. Anak Muda Betawi Untuk Pramono-Rano

3. Relawan si Doel Milenial (RSDM)
4. Pemuda Kreatif Jakarta (PKJ)

Dalam praktiknya, perempuan dan laki-laki sama-sama berada dalam ekosistem pemenangan yang memiliki struktur, jaringan, dan pembagian kerja tertentu. Perbedaannya terletak pada bentuk keterlibatan, posisi yang ditempati, akses terhadap sumber daya, serta pengalaman yang diperoleh masing-masing aktor. Oleh karena itu, keberadaan aktor laki-laki dalam penelitian ini digunakan sebagai konteks untuk memahami lingkungan pemenangan Pramono–Rano, bukan sebagai objek perbandingan utama. Penempatan tersebut sekaligus memberikan batas yang lebih jelas terhadap fokus penelitian. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan atau menentukan kelompok gender yang lebih berpengaruh terhadap kemenangan Pramono–Rano. Pembahasan mengenai laki-laki digunakan untuk menunjukkan bahwa pemenangan pasangan calon merupakan hasil kerja kolektif berbagai aktor. Fokus penelitian tetap diarahkan pada bagaimana perempuan berpartisipasi dalam proses tersebut, bentuk keterlibatan yang dilakukan, faktor yang mendorong partisipasi, jaringan yang dimanfaatkan, serta hambatan yang dihadapi perempuan selama terlibat dalam pemenangan. Dengan demikian, keterlibatan laki-laki berfungsi sebagai konteks yang memperkuat analisis mengenai posisi perempuan dalam ekosistem pemenangan. Kehadiran laki-laki dalam struktur

formal, jaringan relawan, dan aktivitas mobilisasi menunjukkan bahwa perempuan tidak bekerja secara terpisah, melainkan berinteraksi dengan aktor lain dalam proses pemenangan.

Berdasarkan susunan tersebut, organisasi pemenangan Pramono–Rano dapat dipahami sebagai organisasi berlapis. Lapisan pertama berupa struktur inti yang merumuskan arah dan strategi kampanye. Lapisan kedua terdiri atas partai politik, anggota legislatif, juru bicara, serta bidang-bidang fungsional yang menerjemahkan strategi menjadi kegiatan. Lapisan ketiga terdiri atas relawan dan komunitas yang menjalankan sosialisasi, pendekatan kepada pemilih, pendataan dukungan, serta pengawalan suara di tingkat lokal. Pola ini sejalan dengan pendapat Rosenstone dan Hansen (1993) bahwa mobilisasi politik tidak hanya berlangsung melalui organisasi yang tersentralisasi, tetapi juga melalui ajakan langsung dan pemanfaatan jaringan sosial yang telah mempunyai hubungan dengan calon pemilih.

2.4.2 Peran PDI Perjuangan dan Sayap Organisasi Perempuan dalam Pemenangan

Sebagai salah satu partai pengusung utama, PDI Perjuangan memiliki infrastruktur organisasi yang telah terbangun secara sistematis di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dalam hal mobilisasi pemilih perempuan, PDI Perjuangan mengandalkan Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan yang merupakan bagian dari alat

kelengkapan partai, serta berkoordinasi dengan jaringan kader perempuan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga ke ranting kelurahan. Dalam struktur kepengurusan ranting PDI Perjuangan, setiap kepengurusan diwajibkan memenuhi kuota perempuan minimal 30% sebagaimana diatur dalam Peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 01 Tahun 2024, dengan pengurus yang tersebar secara geografis di seluruh wilayah kelurahan hingga tingkat Rukun Warga (RW) (PDI Perjuangan, 2024). Jaringan kader perempuan ini berperan sebagai ujung tombak dalam menggerakkan konstituen perempuan di berbagai komunitas akar rumput.

Selain mengandalkan struktur internal partai, PDI Perjuangan juga membangun koordinasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan perempuan yang secara ideologis memiliki kedekatan dengan partai, sehingga memperluas jangkauan mobilisasi secara organik. Peran PDI Perjuangan dalam kemenangan Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak terbatas pada aspek teknis dan logistik kampanye semata. Partai ini secara aktif mendorong kader-kader perempuannya untuk berani mengambil peran kepemimpinan melalui pendidikan kader perempuan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan menegaskan bahwa PDI Perjuangan memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkiprah memajukan negara,

tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pemimpin struktural partai, legislatif, dan eksekutif (Rakyat Merdeka, 2022).

Kader-kader perempuan PDI Perjuangan yang telah teruji dalam proses pemilu sejak tingkat lokal hingga nasional menjadi tulang punggung operasional mobilisasi di akar rumput. Pengalaman dan kapasitas yang mereka miliki menjadikan proses pengorganisasian jaringan pemilih berjalan lebih efisien dan terstruktur, sebagaimana diargumentasikan Rosenstone dan Hansen (1993) bahwa jaringan kader partai dapat menurunkan biaya mobilisasi karena aktor partai telah mempunyai informasi mengenai lingkungan sosial, tokoh lokal, serta calon pemilih yang dapat didekati. Kader yang telah berpengalaman dalam pemilu juga mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi isu yang relevan, memilih metode komunikasi, dan membangun kepercayaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, struktur PDI Perjuangan dan jaringan kader perempuannya dapat dipahami sebagai infrastruktur mobilisasi yang menghubungkan organisasi pemenangan tingkat provinsi dengan pemilih perempuan di tingkat lokal.

2.4.3 Jaringan Relawan Perempuan Berbasis Komunitas

Di luar jaringan formal partai, tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno mengandalkan para relawan. Kelompok tersebut tidak selalu menjadi bagian resmi dari struktur tim pemenangan, tetapi dapat berfungsi sebagai simpul penyebaran informasi, ruang diskusi

politik, dan saluran ajakan kepada pemilih. Jaringan tersebut dapat terbentuk melalui hubungan pertemanan, lingkungan tempat tinggal, kelompok keagamaan, kelompok usaha, organisasi profesi, kelompok orang tua, arisan, serta komunitas perempuan lainnya di Jakarta yang meliputi kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat RT dan RW, majelis pengajian dan kelompok keagamaan perempuan, kelompok arisan, serta komunitas ibu-ibu yang terbentuk melalui berbagai program sosial pemerintah kota.

Jaringan-jaringan ini secara kolektif membentuk konsep modal sosial Putnam (2000). Hubungan yang erat di dalam komunitas menghasilkan *bonding social capital*, yaitu modal sosial yang tumbuh dari kesamaan identitas, kedekatan, kepercayaan, dan interaksi yang berulang. Dalam komunitas perempuan, modal sosial tersebut memungkinkan informasi politik diterima melalui orang yang telah dikenal, sehingga pesan kampanye tidak hadir sebagai komunikasi formal dari orang asing, melainkan sebagai percakapan antaranggota komunitas.

Kepercayaan yang telah terbangun secara organik di antara anggota komunitas-komunitas tersebut memungkinkan proses penyebaran informasi kampanye berlangsung secara lebih persuasif dibandingkan saluran kampanye formal. Fadhillah (2020) dalam penelitiannya tentang jaringan Majelis Taklim menunjukkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh sesama anggota komunitas yang

saling mengenal dan saling percaya memiliki daya tembus yang jauh lebih efektif dalam memengaruhi preferensi pemilih. Dinamika serupa berlaku pula dalam konteks mobilisasi perempuan di Jakarta, di mana modal kepercayaan yang sudah terbentuk dalam komunitas menjadi infrastruktur informal pemenangan yang beroperasi secara paralel dengan struktur kampanye formal.

2.5 Partisipasi Perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024

2.5.1 Keterlibatan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pilkada

Keterlibatan perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak hanya tercermin dari dominasi kuantitatif mereka dalam DPT, tetapi juga dari partisipasi mereka dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc mendorong keterwakilan perempuan dalam kepanitiaan penyelenggara pemilu, termasuk dalam keanggotaan KPPS di tingkat TPS. Komitmen terhadap inklusivitas gender dalam penyelenggaraan ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif (KPU RI, 2022). Keterlibatan perempuan dalam aspek teknis penyelenggaraan ini memberikan dimensi tersendiri dalam gambaran partisipasi perempuan secara keseluruhan, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap kapasitas dan integritas perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan demokrasi.

2.5.2 Dimensi dan Lapisan Partisipasi Perempuan dalam Konteks Pemenangan

Dalam konteks kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno, partisipasi perempuan menampilkan struktur yang berlapis dan berjenjang sesuai dengan derajat keterlibatan masing-masing individu. Hubungan antarlapisan tersebut menunjukkan bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada *elite* formal, tetapi juga pada kemampuan penggerak lapangan membangun kepercayaan dan pada kesediaan basis pendukung untuk menggunakan hak pilih. Untuk menjelaskan variasi keterlibatan tersebut, penelitian ini mengadaptasi hierarki partisipasi politik Milbrath (1965), yang secara umum membedakan warga negara ke dalam kelompok *apathetics*, *spectators*, dan *gladiators*. Dalam penelitian ini, perempuan yang telah menunjukkan keterlibatan politik dikelompokkan menjadi tiga lapisan analisis, yaitu perempuan pada tingkat pengambil keputusan strategis, penggerak atau pelaksana lapangan, serta basis dukungan. Pengelompokan ini tidak dimaksudkan sebagai kategori yang sepenuhnya kaku karena seorang perempuan dapat berpindah dari satu tingkat keterlibatan ke tingkat lain sesuai dengan pengalaman, kesempatan, sumber daya, dan proses mobilisasi yang dialaminya.

Lapisan pertama atau kelompok *gladiators* mencakup perempuan yang menempati posisi kepemimpinan, koordinasi, dan

pengambilan keputusan dalam struktur tim pemenangan maupun organisasi pendukung. Lapisan ini terdiri atas tiga informan yang memiliki akses lebih dekat terhadap perumusan strategi, pembagian tugas, koordinasi jaringan, dan pengambilan keputusan kampanye. Perempuan pada lapisan ini tidak hanya hadir sebagai peserta kegiatan, tetapi memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas politik orang lain dan menghubungkan struktur pemenangan tingkat atas dengan jaringan pelaksana di bawahnya. Keberadaan perempuan pada lapisan strategis juga memperoleh dukungan dari data sekunder mengenai susunan Tim Pemenangan Pramono–Rano. Dalam struktur tim tersebut terdapat sejumlah perempuan, salah satunya Maudy Koesnaedi yang ditempatkan sebagai wakil ketua tim pemenangan.

Lapisan kedua dalam penelitian ini merupakan kelompok penggerak lapangan yang berada di antara *gladiators* dan *spectators*. Dalam konsep Milbrath (1965), posisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk aktivitas transisional, yaitu keterlibatan yang lebih tinggi daripada sekadar mengikuti atau mengamati politik, tetapi belum selalu menempatkan seseorang sebagai *elite* pengambil keputusan. Lapisan ini terdiri atas perempuan yang menjalankan peran sebagai pelaksana kampanye, koordinator lingkungan, relawan, penghubung komunitas, dan penyampai informasi politik kepada masyarakat. Perempuan pada lapisan penggerak menjalankan berbagai aktivitas, seperti melakukan pendekatan dari *door to door*, mengajak keluarga dan tetangga,

mengorganisasi pertemuan informal, menyebarkan materi kampanye, memberikan informasi mengenai visi dan program pasangan calon, mendata calon pemilih, serta menghubungkan masyarakat dengan struktur tim pemenangan. Mereka menempati posisi strategis karena berinteraksi secara langsung dengan calon pemilih dan memiliki pengetahuan mengenai karakter sosial lingkungan masing-masing.

Melalui hubungan tersebut, pesan kampanye dapat disesuaikan dengan persoalan sehari-hari warga, seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, transportasi, lapangan pekerjaan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Peran penggerak lapangan sejalan dengan penjelasan Rosenstone dan Hansen (1993) bahwa mobilisasi politik umumnya menjadi lebih efektif ketika dilakukan melalui ajakan langsung oleh seseorang yang telah memiliki hubungan sosial dengan calon pemilih. Pemilih tidak selalu terlibat secara spontan hanya karena menerima informasi politik. Mereka sering kali berpartisipasi karena diminta, diajak, atau dihubungi melalui jaringan keluarga, pertemanan, organisasi, dan komunitas. Dalam konteks penelitian ini, perempuan penggerak menjadi aktor yang mengubah jaringan sosial menjadi saluran mobilisasi politik.

Lapisan ketiga atau kelompok *spectators* mencakup perempuan yang tidak menempati struktur kepemimpinan dan tidak secara rutin menjalankan kegiatan kampanye, tetapi tetap mengikuti perkembangan

politik, menghadiri kegiatan tertentu, menyatakan dukungan, serta menggunakan hak pilih. lapisan ini terdiri atas informan yang terutama berpartisipasi sebagai basis dukungan. Bentuk partisipasi mereka antara lain mengikuti informasi mengenai pasangan calon, mendiskusikan pilihan politik dengan keluarga, menghadiri kegiatan kampanye tertentu, menyampaikan pandangan kepada orang terdekat, serta memberikan suara pada hari pemungutan.

Posisi *spectators* tidak dapat disamakan dengan sikap pasif sepenuhnya. Perempuan pada lapisan ini masih dapat berkontribusi melalui komunikasi politik informal di lingkungan keluarga, pertemanan, dan tempat tinggal. Penyampaian informasi mengenai visi, program, atau citra pasangan calon kepada anggota keluarga dan tetangga dapat membantu memperluas jangkauan pesan kampanye.

2.5.3 Faktor Kontekstual yang Melatarbelakangi Partisipasi Perempuan

Tingkat dan bentuk partisipasi perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor kontekstual yang melatarinya. Pertama, konteks transisi status Jakarta dari ibu kota negara menjadi Daerah Khusus Jakarta menciptakan ketidakpastian tentang arah kebijakan dan keberlangsungan program-program sosial yang selama ini dinikmati warga, termasuk program-program yang secara langsung menyentuh kehidupan perempuan seperti layanan kesehatan berbasis kelurahan dan program pemberdayaan ekonomi

komunitas. Ketidakpastian ini berpotensi mendorong perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam menentukan siapa yang akan memimpin Jakarta dalam masa transisi tersebut.

Kedua, ketentuan ambang batas kemenangan lebih dari 50 persen yang diberlakukan khusus bagi Pilkada DKI sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2024 menciptakan tekanan elektoral yang lebih besar dibandingkan pilkada di daerah lain yang hanya mensyaratkan suara terbanyak. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2024 yang diikuti tiga pasangan calon dengan kekuatan yang bervariasi, ambang batas ini mendorong masing-masing tim pemenangan untuk bekerja lebih keras dalam membangun koalisi dukungan yang cukup kuat. Bagi tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno yang didukung oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura, hal ini menjadikan mobilisasi berbasis jaringan komunitas khususnya jaringan perempuan di akar rumput (*grassroots*) sebagai strategi yang tidak tergantikan (KPU DKI Jakarta, 2024).

Ketiga, faktor budaya patriarki yang masih mengakar dalam sebagian masyarakat Jakarta turut membentuk dinamika partisipasi perempuan. Klerista dan Subandi (2025) menegaskan bahwa hambatan-hambatan kultural berbasis relasi gender seperti stereotip peran domestik perempuan, ekspektasi prioritas tugas rumah tangga, dan keterbatasan dukungan dari anggota keluarga masih menjadi tantangan struktural yang nyata bagi perempuan yang ingin terlibat

aktif dalam politik. Pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor kontekstual ini menjadi landasan yang tidak dapat dihindari dalam menganalisis partisipasi perempuan pada Pilkada DKI Jakarta 2024, agar analisis yang dihasilkan mampu merangkum kompleksitas realitas sosial-politik yang sesungguhnya dihadapi oleh perempuan di lapangan.